

PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSI DI SEKOLAH DASAR: STUDI LITERATUR

Alisya Nadiefa Yumna
PGSD FKIP Universitas Bengkulu
alisayayumna539@gmail.co

ABSTRACT

Inclusive education is a government effort to provide equal educational services for all students, including children with special needs (ABK). However, the implementation of inclusive education in elementary schools still faces various problems in its implementation. This article aims to identify the problems in the implementation of inclusive education in elementary schools and the efforts made to overcome these various obstacles. The research method used is a literature study with a qualitative descriptive approach through data collection from journals, books, and previous research relevant to the research topic. The results of the study indicate that the problems of inclusive education include a lack of Special Assistant Teachers (GPK), a lack of parental concern for ABK, the differences in the needs of each student, suboptimal school readiness, a lack of government support, negative community views, and limited facilities and infrastructure supporting inclusive education. Efforts made to overcome these problems include improving teacher competence, providing GPK, increasing cooperation between schools and parents, providing learning support facilities, and socializing to the community about the importance of inclusive education.

Keywords: *probalematiks 1, inclusive education 2, elementary school 3*

ABSTRAK

Pendidikan inklusif merupakan upaya pemerintah untuk menyediakan layanan pendidikan yang setara bagi semua siswa, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK). Namun, implementasi pendidikan inklusif di sekolah dasar masih menghadapi berbagai masalah dalam pelaksanaannya. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah dalam implementasi pendidikan inklusif di sekolah dasar dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui pengumpulan data dari jurnal, buku, dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah-masalah pendidikan inklusif meliputi kurangnya Guru Pembantu Khusus (GPK), kurangnya perhatian orang tua terhadap ABK, perbedaan kebutuhan setiap siswa, kesiapan sekolah yang suboptimal, kurangnya dukungan pemerintah, pandangan masyarakat yang negatif, dan keterbatasan fasilitas dan infrastruktur pendukung pendidikan inklusif. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut meliputi peningkatan kompetensi guru, penyediaan GPK, peningkatan kerja sama antara sekolah dan orang tua, penyediaan fasilitas pendukung pembelajaran, dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan inklusif.

Kata Kunci: *Problematika 1, Pendidikan Inklusi 2, Sekolah Dasar 3*

A. Pendahuluan

Pendidikan adalah proses sadar manusia yang bertujuan untuk membantu siswa belajar dan menjadi lebih baik dalam bidang keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan keterampilan yang diperlukan bangsa dan negara. Pendidikan dijadikan sebagai kewajiban bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Hal ini diperkuat dengan pasal 31 UUD 1945 ayat 1 yang berbunyi "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan." Agar tercapainya pasal ini semua warga negara wajib untuk menjalankan pembelajaran di lingkungan sekolah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dengan perbedaan masing-masing inilah di Indonesia diperkenalkan dengan adanya sistem pendidikan inklusi.

Pendidikan inklusi menurut (Wulandari et al. 2021) merupakan sebuah sistem pendidikan yang dilakukan dalam kelas reguler oleh seluruh anak yang berpartisipasi penuh tanpa mempertimbangkan kondisi fisik, emosional, akademik, atau lainnya. Pendidikan inklusi ini dilaksanakan di sekolah umum yang

siap dan bersedia untuk memberikan pembelajaran kepada siswa dengan kemampuan atau karakteristik yang berbeda-beda.

Kondisi pendidikan inklusi di Indonesia terus berkembang sebagai bentuk kewajiban pemerintah memberikan hak terhadap anak berkebutuhan khusus. Pada awalnya semua anak layanan disabilitas bersekolah di SLB. Namun, menurut (Purbasari et al. 2022) tidak semua anak penyandang disabilitas mengikuti pendidikan di SLB. Karna Keterbatasan jumlah sekolah, jarak tempuh, serta kondisi anak berkebutuhan khusus yang mampu berinteraksi dan belajar bersama masyarakat umum membuat tidak semua anak berkebutuhan khusus untuk sekolah di SLB. Oleh karna itu, di Indonesia pemerintah mengembangkan pendidikan inklusi agar anak berkebutuhan khusus dapat belajar di sekolah umum tanpa adanya diskriminasi. Di kota Bengkulu mulai berkembang adanya sekolah inklusi, seperti Sekolah Alam Bengkulu Mahira, SD Fatma Kenanga bahkan ada beberapa sekolah negeri yang sudah menerapkan.

Meskipun pendidikan inklusi ini berkembang di Indonesia, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut dapat berasal dari berbagai perspektif. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tarnoto, N. 2016) berdasarkan persepsi guru, yaitu kurangnya guru pendamping kelas (GPK), kepedulian orang tua terhadap ABK, kebutuhan anak ABK yang berbeda-beda, belum siapnya sekolah dalam program inklusi, kurang pedulinya pemerintah terhadap pendidikan inklusi, pandangan negatif dari masyarakat, serta kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan inklusi.

Permasalahan dalam implementasi pendidikan inklusif berperan dalam mewujudkan pemerataan dan kesetaraan hak pendidikan yang bagi seluruh anak tanpa terkecuali. Kajian ini diperlukan agar problematika dalam pelaksanaan pendidikan inklusi dapat diketahui serta menjadi bahan evaluasi bagi sekolah, pemerintah, guru, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan inklusi.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji problematika implementasi pendidikan inklusi di sekolah dasar serta menjelaskan berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya, baik dari aspek fisik, emosional, akademik, orang tua, sekolah, pemerintah, maupun masyarakat. Selain itu, artikel ini memberikan gambaran mengenai upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah dasar.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini berupa penelitian konseptual dengan menggunakan metode kualitatif dengan telaah studi literature atau literature review. Menurut pendapat (Sugiyono. 2014) studi literatur berupa kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Metode penelitian studi literatur merupakan sebuah metode yang mengumpulkan berbagai sumber data yang relevan sebagai referensi mengenai masalah yang akan diteliti atau di kaji. Sumber data yang dimaksud seperti jurnal ilmiah, artikel, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan

dengan problematika implementasi pendidikan inklusi di sekolah dasar.

Subjek penelitian dalam kajian ini berupa berbagai referensi dan hasil penelitian yang membahas mengenai problematika yang terjadi dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah dasar, serta upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah dasar.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, membaca, memahami, dan mencatat berbagai sumber penelitian yang sesuai dengan topik yang dibahas. Instrumen penelitian yang digunakan adalah catatan kajian literatur untuk mengidentifikasi catatan penting dari sumber yang digunakan.

Data yang diperoleh kemudian diolah, dianalisis, ditafsirkan, dan disimpulkan menggunakan teknik analisis deskriptif sehingga menghasilkan pemahaman mengenai pemahaman problematika implementasi pendidikan inklusi di sekolah dasar.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusi di sekolah dasar

masih menghadapi berbagai macam problematika dalam proses pelaksanaannya. Pendidikan inklusi ini sendiri pada dasarnya untuk memberikan pendidikan secara merata bagi semua peserta didik tanpa adanya diskriminasi atau batasan, termasuk peserta yang berkebutuhan khusus. Menurut (Alfikri et al. 2022) pendidikan inklusi berarti semua peserta didik yang berkebutuhan khusus di tempatkan di sekolah regular sepanjang hari. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat probelamatika yang terjadi. Sehingga, mempengaruhi keberhasilan dari pendidikan inklusi itu sendiri.

Salah satu problematika utama dalam implementasi pendidikan inklusi di sekolah dasar adalah kurangnya Guru Pembimbing Khusus (GPK). Banyak sekolah yang belum memiliki jumlah guru pembimbing khusus (GPK) yang cukup, sehingga masih banyak guru kelas di sekolah dasar yang menangani seluruh peserta didik termasuk peserta didik berkebutuhan khusus secara bersamaan. Guru menjadi tidak fokus akan perhatian dan layanan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan atau karakteristik peserta

didik yang berbeda-beda. Sehingga pembelajaran tidak berjalan secara optimal.

Problematika berikutnya berasal dari ketidakpedulian orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus. Beberapa orang tua masih belum kurang memahami dalam kebutuhan dan perkembangan pendidikan anak sehingga kerja sama antara sekolah dan orang tua belum berjalan dengan baik. Kurangnya dukungan orang tua dapat mempengaruhi perkembangan akademik maupun social anak berkebutuhan khusus di sekolah.

Selain itu, yang menjadi problematika pendidikan inklusi di sekolah dasar lainnya yaitu, setiap peserta didik berkebutuhan khusus memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda. Hal itu menjadi tantangan dan hambatan bagi guru dalam segi penyampaian pembelajarannya. Guru diharuskan menyampaikan dengan strategi pembelajaran yang berbeda kepada setiap peserta didik. Dengan perbedaan itulah yang menjadikan pendidikan inklusi butuh perhatian dan penanganan yang khusus.

Permasalahan lain pendidikan inklusi di sekolah dasar dapat terlihat

dari kesiapan sekolah dalam menjalankan program pendidikan inklusi. Masih banyak sekolah yang belum siap terhadap program inklusi di sekolah nya. Hal ini bisa dilihat dari segi manajemen sekolah, tenaga pendidik, maupun fasilitas pendukung pembelajaran. Serta, sarana prasarana yang tidak mendukung pendidikan inklusi, misalnya media pembelajaran khusus, ruang layanan, dan aksesibilitas sekolah masih terbatas di sekolah dasar.

Dukungan pemerintah terhadap pendidikan inklusi juga dinilai belum maksimal. Hal tersebut terlihat dari masih kurangnya pelatihan guru, pendampingan sekolah inklusi, serta bantuan fasilitas pendidikan.

Selain itu, masih terdapat pandangan negatif masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus yang menyebabkan proses penerimaan sosial terhadap ABK belum berjalan secara optimal di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi problematika implementasi pendidikan inklusi di sekolah dasar.

Kurangnya guru pembimbing khusus menjadi salah satu problematika utama dalam implementasi pendidikan inklusi di sekolah dasar. Guru pembimbing khusus menurut (Yusuf et al. 2023) sangat memegang peran penting dalam mendukung adanya pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus. Keberadaan guru pembimbing kelas (GPK) ini sangat penting dalam membantu guru kelas menyampaikan materi pembelajaran terhadap anak yang berkebutuhan khusus. Namun, dalam pelaksanaannya banyak sekali sekolah inklusi yang kekurangan atau memiliki guru pembimbing khusus (GPK) terbatas. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian menurut (Kusuma. 2025) yang menyatakan bahwa guru pembimbing khusus (GPK) ABK belum memenuhi Permendiknas No. 1 Tahun 2008. Peneliti melakukan penelitian di tingkat sekolah menengah pertama, yaitu dengan perbandingan 1:6. Bahkan, beberapa sekolah mengharuskan guru pembimbing khusus (GPK) untuk menangani 10 hingga 15 peserta didik yang berkebutuhan khusus. Hal ini membuktikan jika di jenjang sekolah menengah pertama saja

tidak cukup, maka di pastikan di jenjang sekolah dasar juga sama, bahkan jenjang lainnya.

Problematika lain yang dapat mempengaruhi implementasi pendidikan inklusi di sekolah dasar adalah kurangnya kepedulian orang tua terhadap pendidikan anak berkebutuhan khusus. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai tantangan yang dihadapi orang tua, baik dari dalam diri maupun lingkungan sekitar, sehingga menimbulkan stres dan beban emosional dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus. Akibatnya, sebagian orang tua belum mampu memberikan perhatian dan dukungan secara optimal terhadap kebutuhan pendidikan anak. Padahal, dukungan orang tua memiliki peran penting dalam perkembangan belajar dan sosial anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Penelitian Raisa (2016) dalam (Khasanah. 2018) menjelaskan bahwa dukungan sosial memiliki hubungan positif dengan resiliensi orang tua dalam menghadapi berbagai kesulitan. Semakin tinggi dukungan sosial yang diterima, maka semakin tinggi pula kemampuan orang tua dalam mendampingi dan mendukung

perkembangan anak berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, kerja sama antara sekolah, orang tua, dan lingkungan sosial sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan pendidikan inklusi di sekolah dasar.

Perbedaan kebutuhan anak berkebutuhan khusus (ABK) menjadi tantangan khusus bagi guru dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi khususnya dalam proses pembelajaran. Setiap peserta didik yang tidak berkebutuhan khusus sudah memiliki karakteristik atau kebutuhan yang berbeda. Jika pembelajaran di terapkan dalam pendidikan inklusi, maka strategi pembelajaran berupa metode, media, model, pendekatan, dan evaluasi pembelajaran membutuhkan penyesuaian kembali akan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Menurut (Ainscow. 2005) pendidikan inklusi tidak hanya berkaitan dengan cara menerima peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah formal, namun bagaimana cara sekolah mampu menciptakan lingkungan belajar yang menghargai keberagaman dan memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus (ABK) untuk belajar yang setara dengan

peserta didik lainnya. Dengan demikian, guru diharuskan mampu dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif, fleksibel, dan nyaman yang akan sesuai dengan masing-masing kebutuhan peserta didik.

Anak berkebutuhan khusus (ABK) menurut (Lubna et al. 2021) memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan beragam baik dari aspek fisik, aspek emosional, maupun aspek akademik.

Anak berkebutuhan khusus dari aspek fisik menurut (Damayanti. 2015) seperti tunanetra, tunarungu, dan tunadaksa memiliki kebutuhan berbeda-beda juga. Anak tunanetra membutuhkan pembelajaran yang menekankan pada penjelasan verbal yang jelas, penggunaan media yang diraba, serta bantuan audio dalam menjelaskan. Anak tunarungu lebih membutuhkan sistem pembelajaran yang menekankan visualisasinya, yaitu melalui media visual gambar, tulisan, gerakan, dan bahasa isyarat agar informasi tersampaikan dengan baik. Sementara itu, anak tunadaksa memerlukan penyesuaian fasilitas belajar, seperti posisi duduk yang nyaman, serta kondisi lingkungan kelas yang mudah diakses, agar

dapat melakukan pembelajaran secara optimal. Problema yang terjadi adalah banyaknya sekolah inklusi yang belum menyiapkan media dan fasilitas yang memadai.

Pada aspek emosional menurut (Pitaloka. 2022) terdapat anak tunagrahita dan tunalaras. Anak tunagrahita memiliki keterbatasan dalam kemampuan intelektual sehingga membutuhkan pembelajaran secara sederhana, bertahap, dan dilakukan secara ulang berulang. Sementara itu, anak tunalaras memiliki hambatan dalam pengendalian emosi dan perilaku sosial sehingga sangat membutuhkan pendekatan pembelajaran yang lebih sabar, perhatian yang khusus dari guru dan lingkungan yang kondusif agar mereka mampu berinteraksi dengan baik. Problematika yang sering terjadi adalah guru mengalami sulit dalam pengelolaan kelas dengan kondisi emosional dan kemampuan akademik peserta didik yang berbeda.

Pada aspek akademik menurut (Ginting. 2023) terdapat anak yang mengalami learning disability (kesulitan belajar) dan anak gifted (berbakat). Anak gifted learning mengalami kesulitan dalam disleksia,

disgrafia, diskalkulia atau memahami materi tertentu sehingga membutuhkan bimbingan belajar yang lebih intensif dan metode pembelajaran yang variatif, sementara, pada anak gifted atau berbakat istimewa yaitu anak yang memiliki kemampuan atau kecerdasan diatas rata-rata sehingga guru harus memberikan pembelajaran yang lebih menantang dan kesempatan untuk mereka mengembangkan potensi yang dimiliki. Namun, pada faktanya banyak guru yang belum memahami strategi pembelajaran secara berdiferensiasi. Sehingga, menjadi problematika dalam memenuhi kebutuhan akademik setiap peserta didik.

Oleh karena itu, guru perlu memahami adanya karakteristik dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus (ABK) secara detail. Agar setiap peserta didik pendidikan inklusi bisa menjalani proses pembelajaran secara efektif dan seluruh peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama. Serta, harus terjadi proses meningkatkan kompetensi guru terhadap strategi pembelajaran, fasilitas pendukung, serta dukungan sekolah dan pemerintah agar

problematika pendidikan inklusi dapat diatasi dengan baik.

Kesiapan sekolah menjadi faktor yang sangat penting dalam keberhasilan pendidikan inklusi. Tetapi dalam faktanya banyak sekolah yang mengalami problematika dalam kesiapan ini. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hartadi et al. 2019) dalam proses pembelajaran inklusi yaitu ketidaksiapan sekolah terhadap tenaga didik atau guru pembimbing khusus (GPK), ketidaksiapan dalam hal pembelajaran, dan ketidaksiapan daam sarana prasarana penunjang. Sehingga, menjadi catatan besar sekolah yang memiliki program inklusi perlu memiliki manajemen yang baik agar pendidikan baik regular maupun inklusi bisa berjalan dengan lancar.

Selain sekolah, pemerintah juga memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan pendidikan inklusi. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas pelatihan guru, menyediakan Guru Pendamping Khusus (GPK), memperkuat kebijakan pendidikan inklusi, serta memberikan bantuan sarana dan prasarana pendidikan agar sekolah mampu memberikan layanan

pembelajaran yang optimal bagi anak berkebutuhan khusus. Upaya pemerintah dalam memberikan dukungan berupa pelatihan, pendampingan sekolah inklusi, dan bantuan fasilitas pendidikan sangat diperlukan untuk membantu sekolah mengatasi berbagai hambatan pelaksanaan pendidikan inklusi.

Di sisi lain, pandangan negatif masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus juga menjadi hambatan dalam implementasi pendidikan inklusi. Masih adanya stigma sosial menyebabkan anak berkebutuhan khusus kurang mendapatkan penerimaan yang baik di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menghargai keberagaman serta memberikan kesempatan pendidikan yang sama bagi seluruh anak tanpa diskriminasi. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan sekolah, seminar, maupun program penyuluhan masyarakat agar tercipta lingkungan sosial yang lebih inklusif dan ramah terhadap anak berkebutuhan khusus. Dengan adanya kerja sama antara

pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat, pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah dasar diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang ramah bagi seluruh peserta didik.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian literatur, implementasi pendidikan inklusi di sekolah dasar masih menghadapi berbagai problematika, meliputi kurangnya Guru Pendamping Khusus (GPK), rendahnya kompetensi guru dalam menangani anak berkebutuhan khusus, kurangnya kepedulian dan kerja sama orang tua, beragamnya karakteristik serta kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus, belum optimalnya kesiapan sekolah, keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya dukungan pemerintah, serta masih adanya stigma negatif dari masyarakat. Berbagai kendala tersebut memengaruhi efektivitas pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah dasar. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui peningkatan kompetensi guru, penyediaan GPK dan fasilitas

pendukung, penguatan kolaborasi antara sekolah dan orang tua, peningkatan dukungan pemerintah, serta sosialisasi kepada masyarakat. Dengan sinergi berbagai pihak, pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah dasar diharapkan mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, setara, dan ramah bagi seluruh peserta didik.

Berdasarkan hasil kajian ini, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan dukungan terhadap pelaksanaan pendidikan inklusi melalui penguatan kebijakan, penyediaan Guru Pendamping Khusus (GPK), pelatihan bagi guru, serta pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai. Sekolah perlu meningkatkan kesiapan dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi dengan mengembangkan kompetensi pendidik, memperkuat kerja sama dengan orang tua, serta menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Selain itu, masyarakat diharapkan turut mendukung pelaksanaan pendidikan inklusi dengan menghilangkan stigma terhadap anak berkebutuhan khusus dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh peserta didik. Penelitian selanjutnya disarankan

menggunakan metode penelitian lapangan (field research) atau metode campuran (mixed methods) agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi pendidikan inklusi di sekolah dasar serta efektivitas berbagai upaya yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainscow, M. (2005). Developing inclusive education systems: What are the levers for change? *Journal of Educational Change*, 6(2), 109–124.
- Alfikri, F., Khodijah, N., & Suryana, E. (2022). ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSI. *Journal of Syntax Literate*, 7(6).
- Damayanti, P. A. (2015). Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) di kota semarang dengan penekanan desain universal. *Canopy: Journal of Architecture*, 4(2).
- Efendi, M. (2008). Pengantar psikopedagogik anak berkelainan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ginting, R. L., Siburian, A. Y. K., Sianturi, T. E., Sianturi, S. M., Ginting, N. B., & Pratiwi, S. A. (2023). Bimbingan konseling bagi anak cerdas istimewa dan kesulitan belajar (Disleksia, Disgrafia, Diskalkulia). *Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter*, 1(6), 134-145.
- Hartadi, D. R., Dewantoro, D. A., & Junaidi, A. R. (2019). Kesiapan sekolah dalam melaksanakan pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar. *Jurnal Ortopedagogia*, 5(2), 90-95.
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2009). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Jakarta: Kemendiknas.
- Khasanah, N. (2018). Peran dukungan sosial terhadap resiliensi pada orang tua dengan anak berkebutuhan khusus. In *Forum Ilmiah* (Vol. 15, No. 2, pp. 260-266).
- Mudjito. (2012). Pendidikan inklusif. Jakarta: Baduose Media.
- Pitaloka, A. A. P., Fakhiratunnisa, S. A., & Ningrum, T. K. (2022). Konsep dasar anak berkebutuhan khusus. *Jurnal Pendidikan dan Sains*, 2(1), 26-42.
- Purbasari, YA, Hendriani, WH, & Yoenanto, NH (2022). Perkembangan implementasi pendidikan inklusi. *JP (Jurnal Pendidikan): Teori Dan Praktik*, 7 (1), 50-58.
- Smith, J. D. (2012). Sekolah inklusif: Konsep dan penerapan pembelajaran. Bandung: Nuansa.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tarnoto, N. (2016). Permasalahan-permasalahan yang dihadapi sekolah penyelenggara pendidikan inklusi pada tingkat SD. *Humanitas*, 13(1), 50-61.
- Wulandari, RS, & Hendriani, W. (2021). Kompetensi pedagogik guru sekolah inklusi di Indonesia (Suatu pendekatan tinjauan sistematis). *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran, Dan Pembelajaran*, 7 (1), 143-157.
- Yusuf, M., Anggarani, F. K., Wiliyanto, D. A., & Supratiwi, M. (2023). Program mahasiswa pendamping anak berkebutuhan khusus sebagai suporting guru pembimbing khusus di sekolah inklusi Kota Surakarta. *SPEED Journal: Journal of Special Education*, 7(1), 90-98.